

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alder, John, 1989, *Constitutions and Administrative Law*, The Macmillan Press LTD, London.

Asshddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.

D.P, Ngesti, 2010, *Model Harmonisasi Kedudukan dan Harmonisasi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan*, tanpa penerbit, Malang.

Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ibrahim, Jonny, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Penerapannya*, Bayumedia Publishing, Malang.

Indrayana, Denny, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Is, Muhammad Sadi, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Setara Press, Malang.

Juwana, Hikamanto dan Ningrum Natasya Sirait, 2003, *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Business Competition, Jakarta.

Lubis, Ahmad Fahmi dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.

Meyliana, Devi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang.

Murakami, Masahiro, 2003, *The Japanese Antimonopoly Act*, tanpa penerbit, Tokyo.

Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rodhes, R, 1988, *Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Sentral Government in Britain*, tanpa penerbit, London.

Sabar, Saafroedin, 1992, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Suhardi, Moh. Taufik Makaro dan Fauziah, 2012, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makaro, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Usman, Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

German Act Against Restraints of Competition (German Competition Act – GWB)

Keputusan *Kammergericht* Berlin tertanggal 15 Mei 1984.

Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54, 1947) Japan.

Competition Act 2004 Singapore.

Tugas Akhir

Marpaung, Luthfiya Nazla, 2018, *Independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha (Berdasarkan Tinjauan Yuridis UU No. 5/1999)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Trisulo, Evy, 2011, *Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Arjomand, Said Amir, 2003, *Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics*, Journal International Sociology, Vol 18 (1).

Basarah, Ahmad, 2014, *Kajian Teoretis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 43, No.1

Maarif, Syamsul, 2002, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 19.

Simbolon, Alum, 2012, *Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3.

Soemardi, Tresna. P, 2011, *Kajian Holistik Kelembagaan KPPU-RI: Antara Harapan vs Fakta Historis 2002-2011*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 6.

Sukarmi, 2011, *Kedudukan KPPU sebagai Lembaga State Auxiliary*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 6.

_____, *Pembuktian Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 6.

Sukarmi, 2012, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7.

Tauda, Gunawan A., 2011, *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 2.

Artikel Majalah atau Koran

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2013, *Bersatu di Ranah Hukum Persaingan Usaha*, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kompetisi), Edisi 40.

Pasaribu, Benny, 2011, *Amandemen Undang-Undang Cara yang Terbaik Tingkatkan Kinerja*, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kompetisi), Edisi 31.

Sirait, Natasya Ningrum, "Komisi Negara Cenderung Tumpang Tindih", *Kompas*, 15 November 2006.

Internet

Basarah, Ahmad, , “Kajian Teoretis Terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, <http://media.neliti.com/media/publications/4636-ID-kajian-teoritis-terhadap-auxiliary-statesorgan-dalam-struktur-ketatanegaraan-in>, diakses pada 19 Oktober 2018

Djumena, Erlangga, “Status Kelembagaan KPPU Tidak Jelas”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/01/06/19574726/Status.Kelembagaan.KPPU.Tidak.Jelas>, diakses pada 19 November 2018.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Daftar Kelembagaan”, <http://www.menpan.go.id/daftar-kelembagaan-2>, diakses pada 16 November 2018.

Latif, Abdul, “Pejabat KPPU Akui Status Pegawainya Mirip Volunteer”, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/pejabat-kppu-akui-status-pegawainya-mirip-volunteer>, diakses pada 19 November 2018.

Putra, Nanda Narenda, “Pejabat Kisah KPPU yang ditinggal Pergi Para Pegawai”, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/pejabat-kppu-akui-status-pegawainya-mirip-volunteer>, diakses pada 19 November 2018.

Suryatama, Lantiko Hikma, “Analisa Ekonomi Digital dan Persaingan Usaha dalam Pandangan KPPU-nya Jerman”, https://www.kompasiana.com/suryatama/analisa-ekonomi-digital-dan-persaingan-usaha-dalam-pandangan-kppu-nya-jerman_57973fc8e5afbda20c8b4581, diakses ada 17 November 2018.

Yasin, Muhammad, “KPPU Galang Penegakan Hukum Terpadu”, diakses dari <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed35c9270f44/kppu-galang-penegakan-hukum-terpadu>, diakses pada 8 September 2018.